

**Konstruksi Model Pencegahan *Fraud* melalui *Red Flag Based System* di
Pemerintah Kabupaten Jember
(Studi kasus di Inspektorat kabupaten Jember)
*Constructing Fraud Prevention Model through Red Flag-Based System in the
Jember Regency Government*
(A Case Study of the Jember Regency Inspectorate)**

Andriana, Taufik Kurrohman*, Hendrawan Santosa. P, Resha Dwi Ayu Pengesti.M,
Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jember,
Jember, Jawa Timur, Indonesia
Email: Taufik.feb@unej.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menghadirkan sebuah sistem yang dapat mencegah kecurangan dalam bentuk kepatuhan dan pengendalian internal di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember melalui fraud melalui red flag based system. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Inspektorat saat ini membutuhkan indikator untuk mencegah terjadinya fraud. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jember menganalisa risiko-risiko. Risiko-risiko tersebut selanjutnya akan dianalisis akar penyebab serta dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan peta risiko yang telah dibuat, secara keseluruhan jumlah risiko yang terdapat pada 72 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jember sebanyak 412 risiko. Fokus risiko yang berpotensi terhadap kecurangan pada penelitian ini terletak pada kategori risiko yang berkaitan dengan keuangan (finance risk). Adapun jumlah risiko yang berkaitan dengan keuangan yang terjadi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jember, yakni sebanyak 33 risiko.

Kata Kunci: risiko, Fraud, Red Flag

Abstract

This research aims to present a system that can prevent fraud in the form of compliance and internal control within the Jember Regency Government through a red flag-based system. The study uses a qualitative case study method. The Inspectorate currently requires indicators to prevent the occurrence of fraud. The techniques employed to collect data include observation, interviews, and documentation.

The results indicate that all Regional Device Organizations (OPD) in Jember Regency analyze various risks. These risks will be further analyzed for their root causes and the impacts they may generate. Based on the risk map that has been created, there are a total of 412 risks identified across 72 Regional Device Organizations (OPD) in Jember Regency. The focus of the risks with potential fraud in this study lies within the category related to finance (finance risk). Specifically, there are 33 financial-related risks identified across all Regional Device Organizations (OPD) in Jember Regency.

Keywords: Risk, Fraud, Red Flag.

Pendahuluan

Tuntutan masyarakat akan hadirnya pengelolaan yang baik secara transparan dan akuntabel menyebabkan setiap organisasi wajib menghadirkan sebuah tata kelola yang baik (*good governance*). Penerapan tata kelola yang baik akan bermanfaat untuk menjaga dan memperkuat kepercayaan pemangku kepentingan terhadap organisasi dalam mencapai tujuannya. Keberhasilan dalam pencapaian tujuan organisasi dapat dicapai ketika prinsip dan praktik tata kelola yang baik diterapkan di seluruh organisasi. Termasuk pula organisasi pemerintahan. Institusi pengendalian internal di pemerintahan daerah, akan digawangi oleh inspektorat daerah. Inspektorat dituntut untuk dapat bekerja secara efektif dan efisien dalam mengendalikan semua permasalahan teknis dan

strategis di pemerintahan. Hal ini sejalan dengan teori *stakeholder* yang menjelaskan tentang tanggung jawab perusahaan terhadap pihak yang berkepentingan saat perusahaan tersebut melaksanakan tugasnya, dalam hal ini perusahaan adalah pemerintah daerah. Dalam melaksanakan fungsinya, pemerintah bertanggung jawab memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat

sebagai wujud akuntabilitas kepada masyarakat yang berperan sebagai pemangku kepentingan (Subowo, 2020). Bentuk tanggung jawab pemerintah kepada stakeholder dengan meningkatkan pengendalian internal yang diterapkan agar mengurangi terjadinya fraud dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Salah satu cara yang paling efektif untuk diterapkan adalah dengan mengimplementasikan manajemen risiko dalam

pengendalian internalnya. Potensi kecurangan perlu dikendalikan dan dimitigasi. Salah satu Metode untuk memitigasi terjadinya risiko adalah penerapan *Red Flag Based System* (RFBS). RFBS dinilai lebih efektif diterapkan di sektor pemerintahan karena system ini akan mampu mendeteksi potensi kecurangan melalui self assessment based berdasarkan pada aktivitas atau program kerja yang dirancang. Selain itu, RFBS ini juga akan mampu memantau semua program dan aktivitas secara berkelanjutan dari semua aspek yang ada di pemerintahan. Penelitian penting dilakukan karena tiga hal, pertama, penelitian mencoba mengembangkan model RFBS di Instansi pemerintah yang masih belum pernah dilakukan. Kedua, akan memberikan kontribusi praktis dalam pencegahan fraud di Inspektorat Kabupaten Jember. Ketiga, akan mengembangkan RFBS untuk pencegahan fraud berdasarkan hasil temuan yang ada. Pemerintah Kabupaten Jember pernah mendapatkan opini atas laporan keuangan yang tidak wajar pada tahun 2020. Kondisi ini disebabkan oleh ketidakpatuhan Kabupaten Jember terhadap peraturan yang berlaku serta sistem pengendalian internal yang belum optimal (LHP BPK, 2020). Sebagai bentuk mitigasi yang baik, inspektorat daerah kabupaten Jember selaku garda terdepan dalam hal pengendalian internal dituntut untuk mampu mengatasi permasalahan ini dengan menghadirkan sebuah sistem pencegahan kecurangan yang baik. Ditengah keterbatasan sumber daya yang ada, dibutuhkan sinergitas pemerintahan dan akademisi/praktisi di bidang manajemen risiko. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Jember menjadi objek penelitian yang bertujuan membuat model RFBS untuk pencegahan fraud di inspektorat Kabupaten Jember agar mencapai Good Governance di pemerintah Kabupaten Jember.

Rumusan masalah :

Bagaimanakah model pencegahan fraud melalui red flag based system pada inspektorat kabupaten jember.

Kajian Teori

Good Governance Government (GGG)

Good Governance Government (GGG) merupakan tata kelola pemerintahan yang baik yang telah diperkenalkan oleh pemerintah Indonesia, sehingga harus diterapkan di semua pemerintahan baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, untuk menghasilkan pemerintahan yang baik dan bersih. GGG harus diimplementasikan dalam pemerintahan melalui system dan pengelolaan pemerintahan dengan baik dan benar, tidak terhenti hanya sampai pemahaman saja, namun hingga implementasi sehingga akan dapat memberikan manfaat kepada semua pihak yang berkepentingan. Menurut Mardiasmo (2002), baik buruknya pemerintahan bisa dilihat dari bersinggungan dengan semua unsur prinsip-prinsip *Good Governance Government*, yaitu *accountability, transparency, democraton, dan rule of law*.

The committee of Sponsoring Organization (COSO) dalam IAI (2015) mendefinisikan “*internal control as the process implemented by the board of directors, management, and those under their direction to provide reasonable assurance that control objectives are achieved with regard*

to effectiveness and efficiency of operations, reliability of financial reporting and compliance with applicable laws and regulations”. Lima komponen utama internal control menurut COSO adalah lingkungan pengendalian, aktivitas pengendalian, penilaian risiko, informasi dan komunikasi serta monitoring. Begitu halnya dalam pemerintahan sangat memerlukan internal control dalam tata kelola, karena dengan adanya internal control akan dapat menciptakan keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan dan undang-undang yang berlaku. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah merupakan bentuk nyata pemerintah meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara sehingga tercipta GGG.

Seorang auditor harus dapat mengenali *red flags* yang merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal (Narayana & Ariyanto, 2020; Sandhu, 2020). Auditor inspektorat harus dapat mengenali *Red Flags*. *Red Flags* merupakan petunjuk atau indikasi adanya sesuatu yang tidak biasa dan merupakan tanda-tanda bahwa fraud terjadi. Dalam pemerintahan Korupsi atau fraud dapat terjadi pada tahap perencanaan pengadaan barang/jasa (*Planning and Design*), tahap proses pengadaan barang/jasa (*Procurement*), dan tahap pelaksanaan pengadaan barang/jasa (*Implementation*). Dalam Edi (2016) fraud pada proses pengadaan bisa terjadi *fraudulent bids, kolusi (collusion), bid rigging, dan konflik kepentingan (conflict of interest)*. Untuk tahap implementasi, bentuk fraud/korupsi dapat berupa pekerjaan dibawah standar (*substandard work*), *theft and personal use of assets, payroll fraud, dan falsified implementation reports and audits*. Auditor harus dapat mengidentifikasi *red flags* tersebut yang merupakan awal dari sebuah fraud atau korupsi.

Hexagon Fraud.

Penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan pemerintah, namun tidak menutup kemungkinan akan ada tindakan fraud yang dilakukan oleh oknum dalam pemerintahan. Fraud merupakan perbuatan yang dilakukan secara sengaja oleh individu atau kelompok yang merugikan pihak lain demi mendapatkan keuntungan masing-masing. Berbagai pendekatan ditemukan untuk teori fraud. Pengembangan dari fraud triangle, fraud diamond, fraud pentagon, hingga fraud hexagon. Teori Fraud Hexagon dikemukakan oleh Georgios L. Vousinas pada tahun 2017 dalam tulisannya yang berjudul “*Advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. Model.*” Fraud hexagon terdiri dari enam komponen yaitu stimulus (tekanan), capability (kemampuan), collusion (kolusi), opportunity (kesempatan), rationalization (rasionalisasi), dan ego. Enam komponen dalam teori fraud hexagon merupakan hasil pengembangan dari teori fraud triangle, fraud diamond, dan fraud pentagon dengan menambahkan komponen collusion (kolusi). Menurut Vousinas, kolusi merupakan kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak baik oleh individu dengan pihak di luar organisasi, maupun antar karyawan di dalam organisasi. Pada saat kecurangan kolusi terjadi, karyawan yang jujur pun akan ikut melakukan kecurangan dikarenakan lingkungan organisasi yang tidak jujur. Akibatnya, lingkungan yang tidak jujur

akan semakin berkembang dan menjadi budaya organisasi yang sulit untuk dihilangkan. Vousinas menjelaskan, seseorang dengan kepribadian yang persuasif lebih mudah mengajak lingkungannya untuk melakukan kecurangan. Kolusi juga dapat dilakukan dengan memanfaatkan kemampuan yang dimiliki untuk mengambil posisi orang lain.

Red Flag Based System.

Red Flag Based System adalah aplikasi yang dirancang dalam menilai risiko transaksi di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan mengidentifikasi jenis risiko, seperti finansial, strategis, operasional, dan hazard. Setelah itu, aplikasi menyusun daftar risiko dan profilnya untuk mendeteksi potensi fraud. Aplikasi ini memanfaatkan hasil audit internal dan eksternal untuk menemukan indikasi fraud dan mengidentifikasi kemungkinan terjadinya fraud. Jika ditemukan indikasi fraud, RFBS akan menetapkannya sebagai "Fraud Potential" dan memberikan peringatan melalui indikator *red flag*.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi kasus. Inspektorat saat ini membutuhkan indikator untuk mencegah terjadinya fraud. Sementara permasalahan fraud merupakan masalah yang kompleks karena melibatkan orang, perilaku, budaya, peraturan, sistem informasi, dan tata kelola yang saling berinteraksi di suatu organisasi. Teknik yang digunakan dalam memperoleh data adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Wawancara mendalam dilakukan kepada para informan yaitu para personel di bidang perencanaan, penganggaran, penatausahaan, dan pelaporan. Selain itu wawancara mendalam dilakukan juga kepada auditor internal, inspektur, sekretaris inspektorat, kepala bidang, dan kepala seksi di lingkungan Inspektorat. Dokumentasi berupa data perencanaan dan penganggaran, dokumen pelaksanaan program dan kegiatan, penjadwalan kerja, dan dokumen lain yang muncul ketika di lapangan.

Kegiatan dan analisis data dalam penelitian:

1. Peneliti menganalisis peta risiko dari hasil pengabdian, langkah ini bertujuan untuk mengidentifikasi titik-titik mana saja yang bersinggungan dengan masalah fraud.
2. Melakukan wawancara mendalam kepada pihak-pihak terkait untuk menggali lebih mendalam mengenai titik-titik fraud yang mungkin timbul dari hasil langkah pertama.
3. Menganalisa sistem, prosedur, dokumen, serta pengendalian yang sudah ada yang berkaitan dengan titik-titik fraud.
4. Dari hasil langkah dua dan tiga, peneliti mengadakan FGD dengan para informan terkait untuk mendiskusikan indikator-indikator apa saja yang akan dimasukkan dalam Red Flag Based System.
5. Membuat coding makna, kategorisasi makna, menyusun konsep model Red Flag Based System.
6. Merancang model Red Flag Based System.
7. Melakukan FGD untuk konfirmasi hasil model rancangan Red Flag Based System.

8. Menuangkan dalam laporan penelitian dan membuat artikel publikasi.

Hasil dan Pembahasan

Pencapaian sistem tata kelola pemerintahan yang baik dapat ditinjau dari kualitas pengendalian internal dan tingkat kepatuhan yang dilakukan. Dalam hal ini, manajemen risiko memiliki peran dalam menciptakan pengendalian internal yang berkualitas di seluruh wilayah pemerintahan. Menurut Narayana & Ariyanto, 2020 dan Sandhu, 2020 auditor harus dapat mengenali red flags yang merupakan suatu kondisi yang janggal atau berbeda dengan keadaan normal. Inspektorat selaku pihak pembina dan pengawas urusan pemerintahan memiliki andil dalam mengontrol berlakunya sistem pengendalian internal. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian dengan melakukan analisis Manajemen risiko yang merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, yaitu dengan identifikasi berbagai risiko yang ada, serta memetakan risiko tersebut dengan berbagai kategori dan tingkatan. Kategori risiko tersebut selanjutnya akan dijadikan acuan oleh inspektorat dalam menindaklanjuti risiko yang rentan dan berpotensi timbulnya redflag. Dengan demikian institusi pemerintahan akan mengetahui aktivitas mana yang berpotensi terjadi penyelewengan atau kecurangan.

RFBS dirancang untuk menilai risiko-risiko yang mungkin terjadi dalam setiap transaksi Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Aplikasi ini memulai proses dengan mengidentifikasi jenis-jenis risiko, seperti risiko finansial, strategis, operasional, dan hazard. Kemudian, aplikasi akan menghasilkan daftar risiko beserta profilnya untuk mendeteksi pola dan potensi terjadinya fraud secara otomatis.

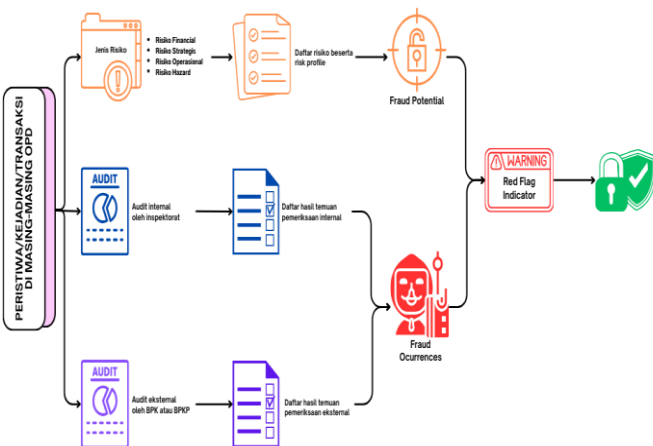
Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jember menganalisa risiko-risiko yang muncul pada bidang kerjanya, risiko-risiko tersebut selanjutnya akan dipilah menjadi peluang atau ancaman. Pemilihan kategori risiko berdasarkan tiga bagian, yaitu risiko yang berkaitan dengan keuangan (*finance risk*), risiko yang berkaitan dengan operasional atau infrastruktur (*operational/infrastructure risk*), risiko yang berkaitan dengan strategi dan perencanaan (*strategy & planning risk*), serta risiko yang berbahaya (*hazard risk*). Risiko-risiko tersebut selanjutnya akan dianalisis akar penyebab serta dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan peta risiko yang telah dibuat, secara keseluruhan jumlah risiko yang terdapat pada 72 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jember sebanyak 412 risiko. Berikut ini adalah beberapa risiko yang terjadi di inspektorat jember:

Status Risiko	Peluang atau Ancaman	Kategori Risiko	Unit Kerja /Fungsi	Sasaran	Periode Identifikasi Risiko	Deskripsi atau Kejadian Risiko
Active	Threat	Financ eRisk	Bag.Hukum	Meningkatnya Produk Hukum Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	2023	Kurangnya persiapan anggaran
Active	Threat	Financ eRisk	Bag.Hukum	Meningkatnya Produk Hukum Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	2023	Anggaran yang dianggarkan tidak sesuai dengan porsi yang dibutuhkan
Active	Threat	Financ eRisk	Bag.Hukum	Meningkatnya Produk Hukum Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	2023	Anggaran yang dianggarkan tidak sesuai dengan porsi yang dibutuhkan
Active	Threat	Financ eRisk	Bag.Hukum	Meningkatnya Produk Hukum Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	2023	Anggaran yang dianggarkan tidak sesuai dengan porsi yang dibutuhkan

Active	Threat	Finance Risk	Ba. Hukum.	Meningkatnya Produk Hukum Daerah Sebagai Dasar Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan	2023	Kurangnya koordinasi dan kerja sama antar pihak terkait
Active	Threat	Finance Risk	Dinas Perhubungan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	2023	Terkendala pada Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
Active	Threat	Finance Risk	Dinas Perhubungan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	2023	Terkendala pada Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah
Active	Threat	Finance Risk	Dinas Perhubungan	Meningkatnya konektivitas antar wilayah	2023	Terkendala pada Administrasi Umum Perangkat Daerah
Active	Threat	Finance Risk	Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan	Meningkatnya Ketersediaan Pangan	2023	Terjadinya gejolak harga barang kebutuhan pokok
Active	Threat	Finance Risk	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Mengoptimalkan, Pemantabaran, Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban atas pelaksanaan Tugas	2023	Data untuk dokumen keuangan SKPD tidak valid/akurat
Active	Threat	Finance Risk	Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Sumber Daya Air	Mengoptimalkan, Pemantabaran, Pelaksanaan dan Penyusunan Laporan Pertanggung Jawaban atas pelaksanaan Tugas	2023	Anggaran penyediaan peralatan kantor tidak mencukupi

Fokus risiko yang berpotensi terhadap kecurangan pada penelitian ini terletak pada kategori risiko yang berkaitan dengan keuangan (finance risk). Adapun jumlah risiko yang berkaitan dengan keuangan yang terjadi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jember, yakni sebanyak 33 risiko. Adapun profil OPD yang memiliki risiko tersebut serta detail kejadian risiko akan terurai pada rincian tabel berikut:

Selanjutnya, RFBS menggunakan hasil audit internal yang dilakukan oleh inspektorat dan audit eksternal oleh BPK atau BPKP untuk mendeteksi indikasi fraud. Hasil temuan audit ini diintegrasikan ke dalam aplikasi dalam bentuk daftar yang digunakan untuk mengidentifikasi kemungkinan terjadinya fraud (fraud occurrences). Jika ditemukan indikasi fraud, RFBS akan menetapkannya sebagai "Fraud Potential" dan secara otomatis memberikan peringatan melalui indikator red flag. Hal ini memungkinkan pengambilan tindakan pencegahan dan pengamanan lebih lanjut, sehingga membantu meminimalkan risiko terjadinya fraud.



Gambar 1. Model red flag based system

Adapun tahapan-tahapan yang dilakukan guna mengetahui aktivitas yang berpotensi terjadi kecurangan pada lingkup pemerintahan Kabupaten Jember, yaitu dengan: Seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jember menganalisa risiko-risiko yang muncul pada bidang kerjanya, risiko-risiko tersebut selanjutnya akan dipilah menjadi peluang atau ancaman. Pemilihan kategori risiko berdasarkan tiga bagian, yaitu risiko yang berkaitan dengan keuangan (finance risk), risiko yang berkaitan dengan operasional atau infrastruktur (operational/infrastructure risk), risiko yang berkaitan dengan strategi dan perencanaan (strategy & planning risk), serta risiko yang berbahaya (hazard risk). Risiko-risiko tersebut selanjutnya akan dianalisis akar penyebab serta dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan peta risiko yang telah dibuat, secara keseluruhan jumlah risiko yang terdapat pada 72 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jember sebanyak 412 risiko.

Fokus risiko yang berpotensi terhadap kecurangan pada penelitian ini terletak pada kategori risiko yang berkaitan dengan keuangan (finance risk). Adapun jumlah risiko yang berkaitan dengan keuangan yang terjadi pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Jember, yakni sebanyak 33 risiko. dengan menggunakan identifikasi risiko yang berpotensi Fraud dan telaah audit eksternal dan internal serta identifikasi Risiko didapatkan model pencegahan fraud melalui red flag based system.

Simpulan dan Implikasi Penelitian

Pegawai berperan penting dalam menjaga kestabilan perkembangan perusahaan melalui kinerjanya, oleh sebab itu pimpinan berkontribusi dalam menjaga kinerja para pegawai. Upaya yang dilakukan dalam pengawasan pegawai salah satunya menumbuhkan mindset profesionalisme bekerja yang tertuang dalam penerapan employee engagement. Konsep disiplin yang dilaksanakan sesuai dengan aturan standart operasional perusahaan. Pemberian reward berupa apresiasi kepada pegawai yang memiliki kualitas kinerja maksimal sebagai penopang semangat pegawai dalam bekerja dan melanjutkan kehidupannya dengan layak. Tindakan yang telah diupayakan oleh pemimpin tentunya ditujukan untuk mendukung berjalannya visi misi perusahaan secara adil. Ketiga variabel berhasil.

Penelitian yang telah dilakukan mampu menerapkan model teori mengenai aspek – aspek employee engagement secara tepat, disiplin yang sesuai dengan standart operasional kerja, serta reward yang memberdayakan para pegawainya. Dengan demikian ketiga komponen ini secara berdampingan mampu memberi support bagi pegawai guna bekerja lebih efisien serta meningkatkan partisipasi pegawai terhadap kesuksesan perusahaan.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kami ucapkan kepada Inspektorat kabuoaten Jember dan Fakultas Ekonomi dan bisnis UNEJ.

Referensi

- Bandiyono, A. (2021). Good Government Governance in The Internal Control System and Audit Opinion. *Jurnal Akuntansi*, 25(1), 120-137.
- Edi. (2016), *Mengenal Fraud red flags. BPKP .go.id*.
- IAI. (2015). Modul Sistem Informasi dan Pengendalian Internal” IAI, Jakarta, www.iaiglobal.org
- Mardiasmo. (2002). Akuntansi Sektor Publik. Andi, Yogyakarta, 2002
- Narayana, A. A. S., & Ariyanto, D. (2020). Auditors experience as moderating effect investigative abilities and understanding of red flags on fraud detection. *International research journal of management, IT and social sciences*, 7(1), 205-216.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Merriam,
- Rustam, Bambang riyanto. (2019). Manajemen Risiko. Salemba Empat, Jakarta.
- S. B., & Tisdell, E. J. (2015). Qualitative research: A guide to design and implementation. John Wiley & Sons.
- Schulz, R., Sense, A., & Pepper, M. (2021). Combining Participative Action Research with an Adapted House of Quality Framework for the Stakeholder Development of Performance Indicators in Local Government. *Systemic Practice and Action Research*, 34(3), 307-330.
- Sandhu, N. (2020). Behavioral red flags of fraud: a gender-based ex post analysis. *Journal of Financial Crime*.
- Stern, T. (2019). Participatory action research and the challenges of knowledge democracy. *Educational Action Research*, 27(3), 435-451.
- Subagyo, A. Simanjutak, R & Bukit, A,I (2020). Dasar-Dasar Manajemen Risiko. Mitra wacana Media, Bogor.
- Subowo, Triono. (2020). Peran Tingkat Penyelesaian Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Dalam Memoderasi Faktor Kelemahan Sistem Pengendalian Internal. *Gorontalo Accounting Journal*, 3(1): 43-54.
- Vousinas. Georgios L. (2017). advancing theory of fraud: The S.C.O.R.E. Model. National Technical University of Athens, Athens, Greece.
- Yin, R. K. (2009). Case Study Research Design and Methods Fourth Edition. Applied Social Research Methods Seiries (Vol. 5).